

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi perubahan sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini mencerminkan proses urbanisasi yang terus berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Saat ini lebih dari 57,7% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan meningkat hingga 70% pada tahun 2050. Proses ini mencerminkan pergeseran struktur ekonomi, di mana saat ini Kota menjadi pusat kegiatan produksi, inovasi dan pertumbuhan ekonomi (*World Bank, 2025*).

Dalam kawasan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, tingkat urbanisasi menunjukkan variasi yang cukup besar antarnegara. Berdasarkan data *World Bank (2025)*, Singapura berada pada tingkat urbanisasi tertinggi yaitu mencapai 100%, Brunei Darussalam 79,4%, dan Malaysia 79,2%. Indonesia menempati posisi keempat, dengan tingkat urbanisasi yang relatif tinggi yaitu 59,2% dibandingkan sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses urbanisasi di Negara ASEAN umumnya berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi, di mana Negara-negara dengan sektor industri dan jasa yang lebih berkembang cenderung memiliki proporsi penduduk perkotaan yang lebih besar.

Di Indonesia, tingkat urbanisasi menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020) diperkirakan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan meningkat sebesar 60% pada tahun 2025, dan diproyeksikan akan mencapai 66% pada tahun 2035. Data ini menjelaskan bahwa populasi perkotaan di Indonesia terus bertambah tahun ke tahun. Beragam permasalahan yang timbul akibat proses urbanisasi menjadi masalah yang relatif besar. Urbanisasi memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan negatif bagi suatu Negara. Menurut Evers dalam Azzahra *et al.* (2024) tingkat urbanisasi yang rendah dan mengesampingkan keperluan-keperluan wilayah Kota mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dampak lain akibat urbanisasi yang tidak terkontrol menyebabkan banyak sekali permasalahan. Urbanisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena di wilayah Kota adalah aktivitas ekonomi berkembang lebih pesat. Kota menjadi pusat kegiatan produksi dan perdagangan yang mampu menyediakan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk (Siswara *et al.*, 2020). Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi saling mendukung, tetapi urbanisasi yang tidak terkendali dan tidak di kelola dengan baik dapat menghambat keberlanjutan pertumbuhan suatu Negara. Meskipun demikian, peningkatan urbanisasi di Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di seluruh wilayahnya.

Hal ini sejalan dengan temuan *World Bank* (2016) yang menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu memperoleh manfaat ekonomi sebesar Negara-negara Asia lainnya dari proses urbanisasi. Setiap peningkatan 1% pertumbuhan

populasi perkotaan di India berkorelasi dengan pertumbuhan PDB Per kapita sebesar 12%, Tiongkok 10% dan Thailand 7%. Sedangkan di Indonesia peningkatan 1% pertumbuhan populasi perkotaan hanya berkorelasi dengan pertumbuhan PDB Per kapita sebesar 4%. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai permasalahan perkotaan di Indonesia seperti kemiskinan Kota, pengangguran, kemacetan dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat produktivitas wilayah perkotaan.

Fenomena urbanisasi di Indonesia saat ini tidak hanya muncul dari peningkatan jumlah populasi perkotaan, tetapi dari semakin kompleksnya permasalahan di perkotaan. Kota-kota besar mengalami tekanan akibat kepadatan, dampak kemacetan, pemukiman kumuh, dan sektor informal (Khoerunnisa *et al.* 2025). Tidak hanya itu, urbanisasi juga dipengaruhi oleh perubahan *preferensi* tenaga kerja, khususnya generasi muda yang lebih memilih bekerja di perkotaan karena peluang ekonomi yang lebih besar, termasuk perkembangan ekonomi digital.

Penelitian-penelitian tentang urbanisasi telah dilakukan oleh banyak peneliti. Berbagai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat urbanisasi di Indonesia maupun diberbagai wilayah lain. Seperti Chen *et al.* (2023) yang meneliti terkait hubungan tenaga kerja terhadap urbanisasi di 163 negara, Sumbaga *et al.* (2023) pengaruh PDRB dan kesempatan kerja terhadap urbanisasi di Indonesia, Idris & Triani (2023) hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan urbanisasi, Maulidiyah dkk. (2024) tentang pengaruh tingkat pengangguran dan angka harapan hidup terhadap urbanisasi di Indonesia. Nurhidayani (2024) faktor lain seperti pendapatan perkapita, kesempatan kerja dan Upah Minimum Kota (UMK)

di Sumatera Utara, dan Faradila (2022) dengan faktor yang sama di Provinsi Aceh.

Penelitian lain dengan sudut pandang faktor-faktor sosial salah satunya dilakukan oleh Rijal & Tahir (2022) tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap urbanisasi di Kota Makassar dan peneliti Denyawan & Mustika (2024) tentang pengaruh rata-rata lama sekolah dan fasilitas kesehatan terhadap urbanisasi di Denpasar. Selanjutnya penelitian oleh Qodhari & Khudhori (2024) yang meneliti tentang dorongan upah minimum terhadap urbanisasi di ASEAN. Penelitian lain dilakukan di Indonesia oleh Anita & Sentosa (2021) dan Mariyanti (2010) dengan model data panel dilanjutkan Arman (2023) upah minimum terhadap urbanisasi di Kota Makassar menggunakan model regresi berganda. Faktor ekonomi lain yaitu faktor industri, seperti yang diteliti oleh Fazaalloh (2017) tentang industrialisasi dengan model OLS, penelitian yang sama dilakukan oleh Khalimatusakdiah (2024) di Indonesia. Selanjutnya penelitian terhadap faktor demografi oleh Mustapita & Khalikussabir (2019) tentang pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap urbanisasi dan Fauziah (2019) meneliti pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap urbanisasi di Jawa Barat.

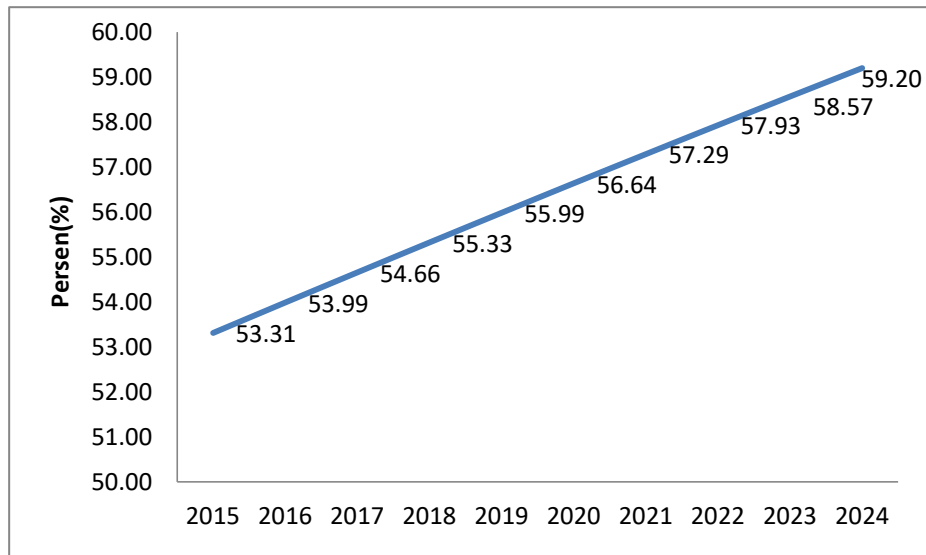
Penelitian ini akan mengkaji urbanisasi di Indonesia yang di lihat dari sisi Upah Minimum Provinsi (UMP), Industrialisasi, dan Pertumbuhan Penduduk. Walaupun penelitian mengenai urbanisasi telah banyak di lakukan, namun hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan (bersifat ambigu). Beberapa penelitian menemukan bahwa variabel UMP, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap urbanisasi, sedangkan penelitian lainnya menemukan hasil yang tidak signifikan dan bahkan

berlawanan. Selain itu, pada penelitian ini penulis mengkaji urbanisasi di Indonesia yang di lihat dari sisi Upah Minimum Provinsi (UMP). Walaupun penelitian sebelumnya telah mengkaji dari sisi Upah Minimum dan Upah Minimum Kota (UMK). Akan tetapi, penelitian ini akan memberi fokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penelitian terdahulu dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi masih menggunakan pendekatan *regresi linier* berganda dan data panel, yang hanya menjelaskan hubungan jangka pendek dan rata-rata antar variabel. Keterbatasan pendekatan ini belum mampu menjelaskan dinamika penyesuaian jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan penggunaan model dinamis *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk melihat keseimbangan di jangka panjang dan membandingkannya dalam jangka pendek.

Urbanisasi merupakan fenomena demografi yang menggambarkan peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan suatu Negara. Todaro & Smith mengartikan urbanisasi sebagai proses perpindahan penduduk daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang di ikuti oleh perubahan pola kehidupan, pekerjaan dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi pembangunan, urbanisasi berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) serta lapangan kerja sektor formal dan informal tercipta di wilayah perkotaan.

Adapun tingkat urbanisasi di Indonesia selama kurun waktu 2015 hingga 2024, dapat di lihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tingkat Urbanisasi Indonesia Tahun 2015-2024 (Dalam %)

Sumber : *World Bank, 2025*

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, tingkat urbanisasi di Indonesia mengalami tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 53,31% kemudian terus menunjukkan kenaikan hingga pada tahun 2024 mencapai 59,20%. Kenaikan sebesar 5,89% dalam kurun waktu 10 tahun mencerminkan percepatan proses urbanisasi nasional. Jika di rata-ratakan, pertumbuhan populasi perkotaan di Indonesia mencapai 0,65% per tahunnya, yang menunjukkan adanya mobilitas penduduk yang terus mengarah ke kawasan perkotaan.

Hal ini dipicu oleh keinginan penduduk pedesaan untuk berusaha memperbaiki kondisi ekonomi ke wilayah perkotaan, dengan harapan Kota memberikan akses yang lebih memadai terhadap peluang pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, tidak hanya itu banyak anak muda yang

memilih untuk tetap berada di Kota setelah menyelesaikan pendidikannya karena dorongan untuk hidup sukses dan mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

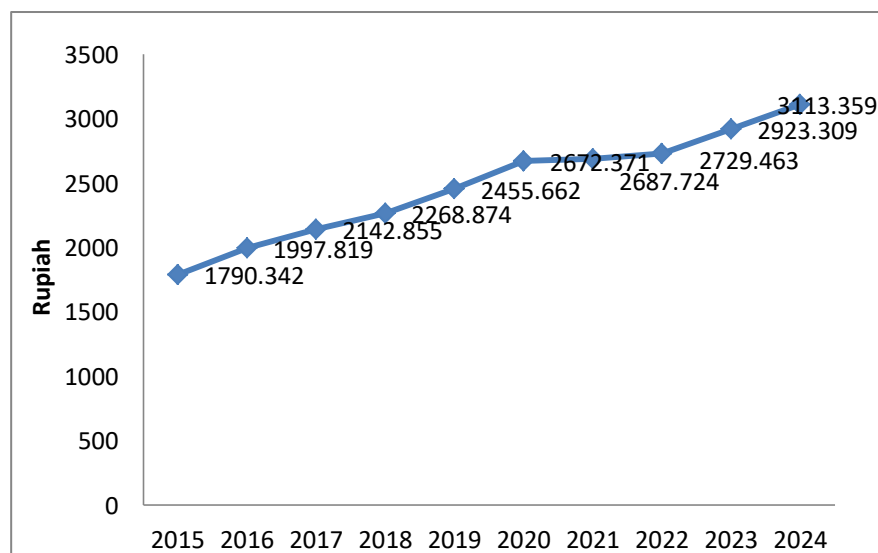
Urbanisasi tidak hanya ditandai oleh peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan, tetapi juga oleh perluasan fisik wilayah Kota (*urban expansion*) yang mengubah lahan pertanian dan kawasan pinggiran menjadi daerah pemukiman baru. *World Bank* (2016) menyatakan bahwa pada tahun 2000 hingga 2010, luas lahan perkotaan di Indonesia mengalami peningkatan dari 8.900 km² menjadi 10.000 km², mengalami kenaikan 12,36% atau sekitar 1,1% pertahunnya, yang merupakan perluasan terbesar di kawasan Asia setelah Negara Tiongkok yang mencapai peningkatan 33% atau sekitar 3,3% pertahunnya.

Tingkat Urbanisasi di Indonesia terus bergerak secara konsisten, sejalan dengan transformasi struktur ekonomi nasional, namun peningkatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan penduduk perkotaan. Menurut Wilonoyudho *et al.* (2017) urbanisasi di Indonesia bersifat sangat terpusat di wilayah Metropolitan besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Medan. Fenomena ini menggambarkan bahwa manfaat urbanisasi belum tersebar merata karena pertumbuhan wilayah perkotaan tidak diimbangi oleh penguatan perencanaan tata ruang Kota yang baik.

Menurut Diputra & Arsha (2023) migrasi dari Desa ke Kota umumnya terjadi karena peluang kerja dan upah yang lebih tinggi di kawasan perkotaan. Arwanto (2025) menyatakan adanya keterkaitan antara tingkat upah dan urbanisasi, dimana faktor upah menjadi salah satu determinan penting dalam keputusan seseorang melakukan migrasi atau urbanisasi. Kajian yang dilakukan oleh Henderson & Turner (2020) juga menyatakan hal yang sama, bahwa proses

urbanisasi di Negara berkembang di pengaruhi oleh perbedaan produktivitas dan pendapatan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, di mana tingkat pendapatan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di Desa.

Perbedaan tingkat upah antar daerah menciptakan daya tarik bagi tenaga kerja untuk melakukan urbanisasi ke daerah yang memiliki tingkat upah lebih tinggi terutama ke kawasan perkotaan yang di lihat memiliki struktur ekonomi yang lebih maju dan infrastruktur yang lebih memadai. Kondisi ini sejalan dengan teori Todaro bahwa seseorang akan melakukan perpindahan dari kawasan pedesaan ke perkotaan bila pendapatan yang diharapkan (*expected income*) tercapai. Oleh sebab itu, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) di suatu daerah dapat menjadi pemicu terjadinya urbanisasi. Berikut gambaran tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2024:



Gambar 1.2 Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia tahun 2015-2024 (Rupiah)

Sumber: BPS, 2020 dan Kementerian Ketenagakerjaan, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tajam selama periode 2015-2024.

Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,6% yaitu 1.997.819 rupiah. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi mencapai 3,02% dan pertumbuhan ekonomi 5,02% pada tahun tersebut. Faktor ini penyebab peningkatan tingkat UMP (*y-on-y*) (Badan Pusat Statistik, 2025).

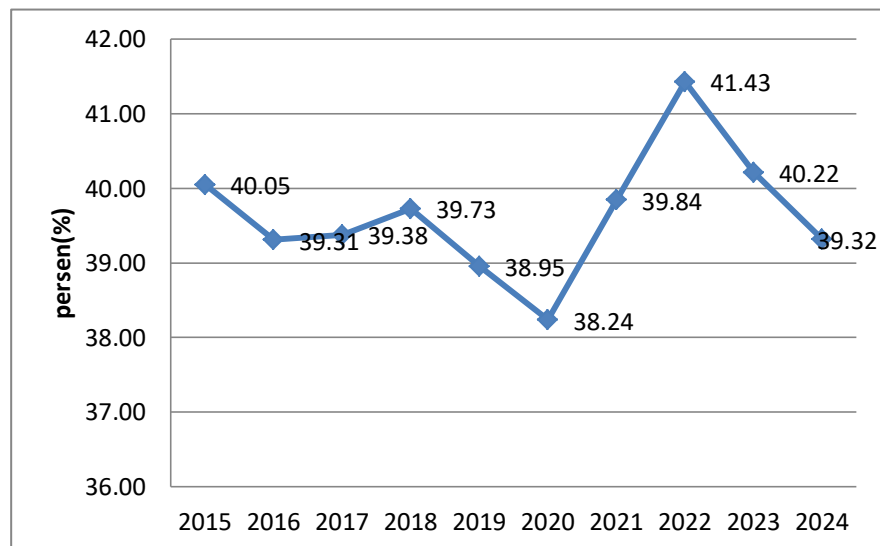
Tren kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) didasarkan oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan penyesuaian tingkat Upah Minimum Provinsi secara berkala untuk menjaga daya beli pekerja terhadap inflasi. Oleh karena itu, setiap tahunnya terjadi peningkatan Upah Minimum Provinsi yang sejalan dengan tren inflasi dan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, penetapan tingkat upah di dasari oleh pertimbangan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan produktivitas tenaga kerja. Selain ini juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong pemerataan antar wilayah.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi dan produktivitas daerah, tetapi juga dapat memengaruhi mobilitas penduduk antar wilayah. Provinsi dengan tingkat upah yang lebih tinggi cenderung menjadi magnet penarik bagi tenaga kerja dari daerah berupah rendah, yang kemudian mempercepat arus urbanisasi di Indonesia.

Selain faktor Upah Minimum Provinsi (UMP), proses urbanisasi di Indonesia juga di pengaruhi oleh variabel lain seperti Industrialisasi. Sektor Industri umumnya berpusat di wilayah perkotaan. Peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri di pengaruhi oleh perkembangan industrialisasi di Indonesia. Sektor industri dan manufaktur menawarkan kesempatan kerja baru dengan potensi penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, industri yang

berlokasi di kawasan perkotaan juga menawarkan infrastruktur yang lebih baik. Menurut BPS (2024), kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 20,39%. Peningkatan ini mencerminkan pergeseran tenaga kerja dari pertanian menuju industri dan jasa yang lebih produktif. Hal ini serasi dengan temuan Sulistiawati & Lestari (2022) yang menjelaskan bahwa industrialisasi di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di wilayah perkotaan.

Selain itu, Oktavilia *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa industrialisasi mendorong urbanisasi melalui penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri. Daerah dengan pertumbuhan industri tinggi mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja formal yang tinggi serta dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai. Berikut yang menggambarkan laju industrialisasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2024:



Gambar 1.3 Industrialisasi di Indonesia tahun 2015-2024 (% dari GDP)

Sumber: *World Bank*, 2025

Berdasarkan data pada Gambar 1.3 diatas, perkembangan industrialisasi di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2015 hingga 2024. Pada tahun

2015, laju industrialisasi mencapai 40,05%, lalu pada tahun 2016, terjadi penurunan mencapai 39,31%, penurunan ini disebabkan oleh pelemahan harga komoditas dunia yang turut menekan nilai tambah industri di dalam Negeri. Selanjutnya pada tahun 2018 sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 39,73%. Hal ini berkaitan dengan peningkatan industri manufaktur nasional. Dengan disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur sedang dan besar pada tahun 2018 mencapai 4,07% dibanding tahun sebelumnya, terutama oleh produksi industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki mencapai 18,78% (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pada tahun 2020 hingga 2022 industrialisasi Indonesia kembali mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 angka industrialisasi mulai menunjukkan peningkatan dengan kenaikan mencapai 4,18% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sekitar 41,43% di mana laju industrialisasi meningkat sekitar 8,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemulihan kegiatan ekonomi pasca pandemi COVID-19, seiring dengan adanya pemulihan aktivitas produksi dan investasi di sektor industri. Selain itu juga didukung oleh mulai meningkatnya permintaan ekspor komoditas olahan serta pergeseran strategi industri menuju *hilirisasi* sumber daya alam untuk menambah nilai tambah domestik.

Pada tahun berikutnya laju industrialisasi kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2023, persentase industrialisasi menurun menjadi 40,22%, di sebabkan perlambatan ekonomi global yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat menekan permintaan ekspor produk industri dari Indonesia. Dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 39,32% pada tahun 2024. Hal

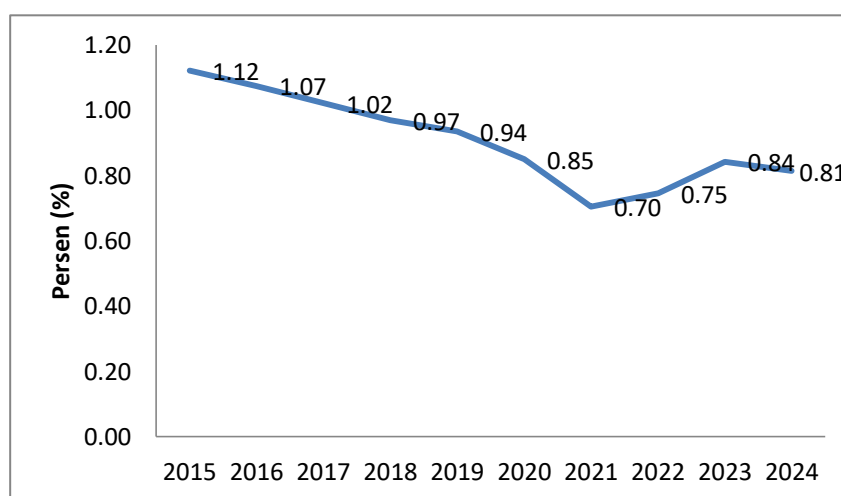
tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan eksternal, seperti peningkatan biaya energi dan bahan baku impor, perlemahan global terhadap produksi dalam Negeri, serta melemahnya daya beli masyarakat yang tidak hanya didasari oleh inflasi tetapi juga ketertarikan masyarakat akan produk-produk impor Tiongkok yang di anggap lebih murah dan lebih berkualitas.

Secara teori, keterkaitan antara industrialisasi dengan urbanisasi memiliki korelasi positif, dimana jika industrialisasi meningkat maka urbanisasi juga turut meningkat. Akan tetapi keadaan tersebut tidak wujud pada tahun tertentu. Dapat di lihat pada tahun 2015 hingga 2016, industrialisasi turun dari 40,05 persen hingga 39,31 persen sedangkan persentase urbanisasi pada tahun yang sama meningkat dari 53,31 persen hingga 53,99 persen. Demikian juga pada tahun 2018 hingga 2020, industrialisasi turun hingga mencapai 38,24 persen dan tidak di ikuti oleh penurunan urbanisasi, selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2024, industrialisasi mengalami penurunan dari 41,43 persen hingga 39,32 persen. Hal ini juga tidak di ikuti oleh penurunan urbanisasi, tetapi justru meningkatkan urbanisasi pada tahun yang sama dari 57,93 persen hingga 59,20 persen.

Selain dipengaruhi oleh tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Industrialisasi, urbanisasi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong permintaan akan perumahan layak, lapangan kerja dan fasilitas ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (2024) jumlah penduduk Indonesia mencapai 287 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,04% pertahun, yang menempatkan Indonesia sebagai Negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menimbulkan tekanan terhadap kapasitas wilayah pedesaan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, infrastruktur serta perumahan. Kondisi ini mendorong seseorang melakukan perpindahan penduduk dari pedesaan ke wilayah perkotaan yang dianggap memiliki peluang ekonomi dan akses infrastruktur yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Viriezky *et al.* (2025) yang menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk Indonesia dapat mendorong urbanisasi dengan cepat dan menimbulkan kebutuhan besar akan infrastruktur Kota.

Selain itu, hal serupa di sampaikan oleh Hasibuan (2025) bahwa pertumbuhan penduduk dan kebijakan pembangunan wilayah baru mempercepat transformasi lahan pedesaan ke perkotaan. Berikut data yang menggambarkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2024.



Gambar 1.4 Pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2015-2024 (% pertahun)

Sumber: *World Bank*, (2025)

Berdasarkan pada Gambar 1.4 diatas, menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami perlambatan selama kurun waktu 10 tahun. Pada tahun 2015 hingga tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk terus melambat, Hal ini menggambarkan bahwa terdapat transisi demografi di Indonesia, dimana

laju kelahiran semakin rendah akibat meningkatnya kesadaran masyarakat akan program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB), peningkatan pendidikan terhadap perempuan serta perubahan pola hidup masyarakat menuju perencanaan keluarga yang lebih rasional.

Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2023 terlihat laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan. Hal ini karena pada tahun tersebut terdapat perbaikan pada layanan kesehatan dan penurunan angka kematian yang dapat meningkatkan jumlah penduduk yang bertahan hidup. Dan pada tahun 2024, kembali mengalami perlambatan karena di pengaruhi oleh pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19, yang berdampak pada dinamika mobilitas perencanaan keluarga yang lebih matang. Dapat di simpulkan bahwa tren perlambatan ini menunjukkan di Indonesia telah memasuki tahap lanjut dalam transisi demografi.

Secara teori, keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dengan urbanisasi memiliki korelasi positif, dimana jika pertumbuhan penduduk meningkat maka urbanisasi juga ikut meningkat. Namun demikian, keadaan ini tidak wujud pada tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2015 hingga 2021, persentase pertumbuhan penduduk turun dari 1,12 persen hingga 0,70 persen. Sedangkan urbanisasi mengalami kenaikan dari 53,31 persen hingga 57,29 persen. Demikian juga terjadi pada tahun 2023 sampai 2024 yang mana pertumbuhan penduduk menurun dari 0,84 persen hingga 0,81 persen, tetapi tidak di ikuti dengan penurunan urbanisasi.

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan, maka penulis akan meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Industrialisasi, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Urbanisasi Di**

Indonesia” dengan menggunakan metode ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*) dalam kurun waktu 1992 hingga 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap urbanisasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana Pengaruh industrialisasi terhadap urbanisasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap urbanisasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap urbanisasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Untuk menganalisis pengaruh industrialisasi terhadap urbanisasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap urbanisasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian memberikan pemahaman mengenai relevansi teori migrasi dan teori pembangunan ekonomi dalam menjelaskan fenomena urbanisasi.
2. Penelitian dapat memperkaya literatur empiris penelitian selanjutnya yang membahas tingkat urbanisasi di Negara Indonesia.
3. penelitian memberikan pemahaman dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan terkait hubungan faktor ekonomi dan faktor demografi terhadap urbanisasi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil temuan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah dan pemangku kebijakan: Sebagai dasar untuk mengambil keputusan kebijakan terkait urbanisasi.
2. Bagi masyarakat/pembaca: Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan dan penelitian tentang urbanisasi.
3. Bagi akademisi dan peneliti: Sebagai referensi empiris peneliti selanjutnya dalam mengkaji mengenai hubungan faktor ekonomi dan demografi terhadap urbanisasi.